



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Deputy Bidang Administrasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPR RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 8 Agustus 2025
Pihak Pertama,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan DPR RI			
1.	Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan RUU baik usulan inisiatif DPR maupun usulan pemerintah yang disepakati bersama antara DPR RI dan pemerintah berdasarkan prolegnas 2025-2029 dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan pembangunan nasional	1. Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan fungsi Legislasi DPR RI	100%
		2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI	2,50
2.	Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, Kebijakan Pemerintah, serta pemeriksaan atas pengelolaan tanggungjawab keuangan negara yang disampaikan BPK, dan kebijakan lainnya dalam rangka mendukung akuntabilitas pemerintahan	1. Persentase capaian dukungan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI	100%
		2. Indeks persepsi masyarakat atas kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI	2,50
3.	Terwujudnya kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI untuk menguatkan fungsi peran DPR RI dalam pembangunan nasional	1. Persentase capaian dukungan penyelenggaraan kebijakan tata kelola kelembagaan DPR RI yang berisikan peraturan/ keputusan DPR RI, kebijakan kerumahtanggaan, dan atau dokumen kebijakan lainnya yang dimanfaatkan	100%
B. Program Dukungan Manajemen			
4.	Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna lainnya atas dukungan administrasi Setjen DPR RI	3,75
		2. Persentase capaian kinerja dukungan administrasi untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam pembangunan nasional	100%
5.	Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung yang berintegritas dan akuntabel untuk fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi	1. Indeks Reformasi Birokrasi	88,00
		2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,00
		3. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,69)
		5. Indeks Sistem Merit	363
		6. Indeks SPBE	4,23



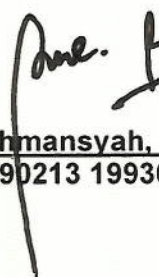
Program	Anggaran
Satker Dewan	Rp5.692.765.052.000,00
1. CF. Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp3.874.715.318.000,00
2. WA. Program Dukungan Manajemen	Rp1.818.049.734.000,00
Satker Setjen	Rp1.612.156.859.000,00
WA. Program Dukungan Manajemen	Rp1.612.156.859.000,00

Sekretaris Jenderal,

Jakarta, 8 Agustus 2025
Plt. Deputy Bidang Administrasi,



Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom.
NIP. 19661114 199703 1 001



Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

